

KOLABORASI PERAN DIPLOMASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DENGAN UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI MILITER INDONESIA**Evi Dwi Hastri ⁽¹⁾****R. Aj. Nindya Rizky Utamie ⁽²⁾****^{(1) (2)} Fakultas Hukum Universitas Wiraraja**evidwihastri@wiraraja.ac.id ⁽¹⁾nindyarizkyu11@gmail.com ⁽²⁾**ABSTRAK**

Diplomasi dikenal dengan seni atau praktek dalam hal bernegosiasi yang dilakukan oleh seorang diplomat sebagai wakil sebuah negara atau organisasi. Diplomasi ini langsung berkaitan dengan diplomasi internasional yang mengurus beberapa hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Orang-orang menganggap diplomasi ini adalah sebuah cara untuk mendapatkan keuntungan secara halus. Politik luar negeri suatu negara bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dari negara tersebut. Politik luar negeri suatu negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional. Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan diplomasi politik luar negeri. Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan negara maju dan negara berkembang. Secara umum, sifat, bentuk, intensitas, organisasi, dan lingkup diplomasi Indonesia berbeda setiap periode karena berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di level domestik maupun level internasional. Di banyak negara angkatan bersenjata merupakan komponen terpenting dalam melindungi negara dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari dalam maupun luar negeri. Di Indonesia, pemberian tugas pertahanan kepada militer bertujuan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri. Peralatan angkatan perang ini sangat perlu karena tidak hanya merupakan ancaman bagi keamanan atau integrasi wilayah tetapi juga ancaman bagi keamanan manusia. Mengingat tantangan yang dihadapi Indonesia maka dirasa perlu untuk meningkatkan kompetensi militer sebagai variabel utama. Peningkatan dan pengembangan pada kompetensi militer bertujuan untuk melindungi pertahanan nasional.

Kata Kunci : *Diplomasi, Politik Luar Negeri, Kompetensi Militer*

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
keamanan. Pandangan pertama yakni yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan itu lebih luas dari pada keamanan militer atau *military security*. Pandangan kedua yakni menentang perluasan ruang lingkup dari pada keamanan dan lebih konsisten dengan adanya *status quo*. Terakhir, pandangan ketiga yakni berusaha untuk memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia atau *human emancipation* yang mempunyai arti “pembebasan manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari kelompok”.¹

A. PENDAHULUAN

Setiap negara menjadi pemeran utama dalam cerita Hubungan Internasional. Setiap negara mempunyai kepentingan masing-masing yang tentu berbeda dari negara lain serta mempunyai tanggung jawab dalam mempertahankan negara. Salah satu hal yang tidak pernah lepas dari cerita Hubungan Internasional adalah permasalahan tentang keamanan negara. Bahasan mengenai keamanan negara ini begitu luas dan terbagi menjadi 3 (tiga) yakni keamanan nasional, keamanan internasional, dan keamanan global.

Keamanan atau dikenal *security* ini memiliki definisi secara umum yang diartikan sebagai suatu bentuk kemampuan mempertahankan diri (*survival*) dalam menghadapi ancaman-ancaman yang nyata atau *existential threat*. *Security* atau keamanan ini mempunyai 3 (tiga) tolak ukur, di antaranya: a) kemampuan, di mana hal ini dapat dilihat dari seberapa besar ideologi dapat melawan suatu ancaman; b) keyakinan, di mana hal ini dilihat dari seberapa besar ideologi dapat mengalahkan suatu ancaman; c) *strenght, weakness, opportunity, threat*, di mana dalam hal ini dapat menganalisis bentuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Menurut Mely Caballero-Anthony, ada 3 (tiga) pandangan mengenai

Untuk memenuhi kepentingan masing-masing negara maka dibutuhkan kehadiran diplomasi. Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.² Diplomasi juga mempunyai arti secara luas dan secara sempit. Secara luas, diplomasi merupakan pendirian dan perwujudan politik luar negeri dalam setiap tingkatan. Sedangkan, secara sempit, diplomasi merupakan hubungan yang resmi antara masing-masing pemerintahan itu terjadi.

¹ Heru Susetyo, *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, Lex Journalica, Volume 6, Nomor 1, 2008, h.1

² Asep Setiawan, *Teori dan Praktik Diplomasi*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016, h. 1

Secara etimologis, kata “diplomasi” berasal dari kata Yunani “diploun” berarti melipat. Hal ini merujuk kepada fenomena yang ada pada masa Kekaisaran Romawi di mana semua paspor yang melewati jalan negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat dan dijahit jadi satu. Surat jalan logam ini disebut “diplomas”.³ Dalam bahasa Inggris, *diplomacy* yang merupakan kata benda dengan arti *the profession, activity, or skill of managing international relations, typically by a country's representatives abroad, or the government should assign an ambassador-at-large to oversee diplomacy in the region* (profesi, kegiatan, atau keterampilan mengelola hubungan internasional, biasanya oleh perwakilan negara di luar negeri, atau pemerintah harus menugaskan duta besar untuk mengawasi diplomasi di kawasan tersebut).

Arus perubahan semakin terjadi dan sangat cepat hingga menghadirkan sebuah fenomena global yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara global. Dalam suatu keseimbangan antara peran diplomasi dan peran militer sebagai angkatan perang tentu tidak terlepas dari adanya kekuatan untuk melindungi wilayah teritorial. Peranan dari angkatan perang Indonesia sangat penting,

³ *Ibid*, h. 2

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 mengingat telah dituliskan dalam sejarah Indonesia bahwa pernah mengirimkan pasukan perang yang diberi nama “Pasukan Garuda” dan beberapa pasukan perang yang lain untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.⁴

Dalam ruang lingkup diplomasi dijelaskan bahwa diplomasi pasti berhubungan dengan kegiatan politik luar negeri atau hubungan internasional dengan negara lain. Hubungan internasional ini diwakili oleh seorang diplomat yang nantinya akan menyampaikan tujuan-tujuan untuk membicarakan bermacam-macam hal yang mempunyai kaitan dengan kepentingan negara-negara yang sedang bekerjasama. Dengan hadirnya diplomasi ini juga dapat menyelesaikan permasalahan dan perbedaan pada negara yang bekerjasama melalui negosiasi. Jika negosiasi tersebut gagal, maka akan memunculkan konflik antar negara.

Dalam tujuan diplomasi dijelaskan bahwa diplomasi mempunyai 4 (empat) tujuan utama yakni *acquisitionn* (perolehan), *preservation* (pemeliharaan), *augmentation* (penambahan), dan *proper distribution* (pembagian yang adil). Namun tujuan fundamental lainnya adalah memajukan ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersil, perlindungan warga

⁴ Widya Noventari, *Peran Diplomasi Politik Luar Negeri dan Angkatan Perang dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional*, Universitas Gadjah Mada, h. 123

negara sendiri di negara lain, mengembangkan budaya dan ideologi, peningkatan prestise nasional, dan memperoleh persahabatan dengan negara lain.

Dalam tugas dan fungsi diplomasi tentu tidak akan lepas dari para diplomat dan para wakil diplomatiknya pada suatu negara sebagaimana tercantum dalam Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik. Secara khusus, kode etik diplomat telah ada dan harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Seorang diplomat tidak boleh melanggar kode etik diplomat yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Diplomatik.

Dalam Konvensi Wina 1961 yang terdiri dari 53 pasal meliputi aspek-aspek penting dari hubungan diplomatik secara konsisten dari setiap negara. Berdasarkan sejarah, setelah berdirinya PBB pada tahun 1945, pengembangan kodifikasi yang dilakukan pertama kali untuk hukum internasional termasuk hukum diplomatik di dalamnya telah dimulai pada tahun 1949 yang dilakukan dengan intensif oleh Komisi Hukum Internasional terkhususkan pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekebalan dan pergaulan diplomatik yang digariskan dengan rinci.

Mengenal diplomasi pertahanan yakni aktivitas kerjasama antar negara

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 yang dilakukan dengan baik secara multilateral maupun bilateral yang dilaksanakan militer sekaligus *stakeholder* terkait. Dalam diplomasi pertahanan ini kerjasama yang dilakukan mulai dari pembahasan isu-isu strategis seperti disediakannya pasukan pemelihara perdamaian atau dikenal *peace keeping force*, penegakan keamanan atau dikenal *peace enforcement*, pemerintahan yang baik tanggap bencana atau dikenal *good governance*, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan lain-lain.

Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah istilah yang relatif baru yang sangat terkait dengan bahasa politik baru yang menggambarkan kerja sama antar negara atau organisasi internasional setelah berakhirnya perang dingin. Perluasan definisi diplomasi pertahanan yakni sebagai penggunaan angkatan bersenjata secara damai dan infrastruktur terkait sebagai alat keamanan luar negeri dan alat kebijakan. Diplomasi pertahanan melalui beberapa aspek seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan, dan diplomasi sehingga negara-negara dapat mempunyai hubungan pertemanan, terlebih dapat menjalin hubungan kerja sama, dan dapat meningkatkan kepercayaan. Ada 3 (tiga) karakteristik tujuan yang dapat mengidentifikasi makna dari diplomasi pertahanan, yakni *confidence building measures (CBMs)*, *civil-military relation*

dan *wider foreign policy objectives in the other countries' area of defense*.

Politik luar negeri Indonesia sejak orde lama, orde baru, sampai dengan orde reformasi dipenuhi dengan dinamika kepentingan antar elit politik di dalam negeri. Problematika yang dihadapi selama ini oleh pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan politik luar negeri seringkali diwarnai oleh pergulatan dua kementerian yang saling bertentangan, yakni Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan semenjak orde baru hingga saat ini masih lebih dominan dalam urusan politik luar negeri, khususnya di bidang pertahanan, terutama berhubungan dengan kerjasama pertahanan dan diplomasi militer serta diplomasi pertahanan.

Dalam sebuah artikel yang merupakan hasil Karya Tulis Militer karya Mayor Inf. Iwan Pribadi Sartono pada tahun 2017 yang terdapat pada *Jurnal Karya Vira Jati Seskoad*, diberi judul “Tarik Menarik Kepentingan antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bidang Pertahanan Negara di Era Orde Lama dan Orde Baru”. Dalam tulisan tersebut menganalisis tentang bagaimana pergulatan antar kekuatan politik yang ada di Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Pertahanan serta dominasi

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
Kementerian Pertahanan yang selalu mengalahkan Kementerian Luar Negeri dalam hal perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri di bidang pertahanan negara, khususnya diplomasi militer dan diplomasi pertahanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kemudian bagaimana bentuk diplomasi politik luar negeri Indonesia dari periode ke periode, lalu bagaimana upaya peningkatan kompetensi militer Indonesia untuk pertahanan negara.

Menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meneliti bahan-bahan hukum seperti kaidah atau peraturan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengulas regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analitis.

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “**Kolaborasi Peran Diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia Dengan Upaya Peningkatan Kompetensi Militer Indonesia**”

B. PEMBAHASAN

1) Bentuk Diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia Dari Periode Ke Periode

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
agenda politik luas yang mencakup gagasan kiri.

a. PERIODE IR. SOEKARNO

Politik luar negeri Indonesia pada periode itu lebih condong pada kepentingan politik domestik dari pada lingkungan internasional. Alasannya adalah Indonesia yang baru mereka dan belum seutuhnya diakui kedaulatannya dari negara-negara yang ada di dunia. Sedangkan, syarat dari diakuinya suatu negara yang berdaulat penuh yakni diakuinya negara tersebut oleh negara lain bahwa negara baru telah merdeka dan berdaulat.

Pada tahun 1945 hingga 1965 adalah masa Soekarno. Pada masa itu, politik luar negeri Indonesia yang bersifat *high profile*, flamboyan, heroik, diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme, serta konfrontatif. Dengan tujuan ingin menyejahterakan suatu bangsa, Soekarno lebih senang menggunakan gaya politik yang revolusioner baik dalam lingkup domestik ataupun luar negeri. Pada masa presiden pertama Republik Indonesia itu telah diasosiasikan bersama kelompok dari negara-negara komunis. Hubungan yang begitu dekat dengan para pemimpinnya membuat kebijakan yang diberlakukan pada masa itu terkesan berada di garis kiri dan Indonesia dikenal dengan negara yang sangat akrab dengan negara komunis dan didukung dengan Soekarno mempunyai

Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa itu membawa Indonesia pada aliran kiri dengan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Pyongyang-Peking. Poros tersebut memosisikan Indonesia dalam posisi yang aneh bagi negara barat. Puncaknya terjadi ketika Indonesia keluar dari keanggotaan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Namun, Soekarno menyatakan bahwa dirinya bukan seorang komunis.

Hubungan Indonesia yang begitu dekat dengan negara komunis mempunyai pengaruh dengan agresivitas politik luar negeri Indonesia. Faktor-faktor determinan yang berpengaruh terhadap pola pembentukan kebijakan pelaksanaan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri pasca proklamasi masih tidak stabil dan diwarnai dengan pertentangan basis pencarian serta pemilihan ideologi negara. Kedua, kondisi ekonomi Indonesia saat itu yang terbilang masih sangat kacau dan terpuruk, ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi bahkan hingga mencapai 600%. Ketiga, pengambilan keputusan pada saat itu bersifat sangat sentral dan cenderung pada sosok kharismatik Soekarno. Beliau menjadi tokoh andalan Indonesia dalam forum internasional, bahkan rakyat Indonesia menobatkan Soekarno sebagai “Presiden Seumur

Hidup”. Sentralisasi peran Soekarno ini juga yang akhirnya mendorong beliau melakukan pendekatan-pendekatan “terpimpin” hingga akhirnya terbentuk Demokrasi Terpimpin Pancasila yang menggantikan Demokrasi Parleментар RIS. Keempat, lingkungan internasional pada saat itu berada pada masa Perang Dingin, di mana dunia terbagi menjadi 2 (dua) kekuatan besar, yakni blok barat dan blok timur. Kepentingan Indonesia sendiri pada saat itu adalah dalam rangka menjaga dan memelihara integritas politik bangsa Indonesia yang baru saja merdeka sebagai fondasi bagi *nation-building* dan *state-building*. Di sinilah Indonesia menetapkan posisinya dalam kerangka Politik Luar Negeri Bebas-Aktif.

b. PERIODE SOEHARTO

Masa orde baru adalah salah satu bentuk peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Masa orde baru adalah julukan bagi pemisah rezim yang berkuasa pada saat itu. Setelah selesainya masa Soekarno pada tahun 1960-an, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia di mana pada masa orde lama terjalin hubungan diplomatik yang kurang baik dengan beberapa negara karena faktor karakter pemimpin dan bangsa begitu kuat dalam pandangan Internasional, apalagi pada faktor *power shift* pasca Perang Dingin yang menjadikan politik di masa itu sangat

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934 kuat dan tegas ketika berhadapan dengan dunia luar. Dengan menunjukkan kekuatan sebagai negara yang kuat, hubungan yang terjalin dengan beberapa negara Asia Tenggara kurang baik, padahal Indonesia adalah bangsa yang berdaulat dan membutuhkan interaksi dengan dunia luar dalam segala bidang.

Pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, Indonesia lebih mementingkan pembangunan di sektor ekonomi. Minat pada pola-pola ekonomi maupun politik internasional mempunyai perolehan yang tinggi untuk mengerti tentang dinamika internal yang menjadi faktor penentu dalam memengaruhi polugri pada masa kepemimpinan Soeharto. Faktor-faktor politik dan ekonomi yang dirasa sangat penting tersebut adalah kondisi domestik, modalitas, struktur dan proses penentuan politik luar negeri, agenda utama, isu-isu domestik yang dominan dan gaya serta pola kepemimpinan politik.

Pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan dengan baik, tanpa stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang menjadi alasan Soeharto mengambil beberapa kebijakan polugri, yakni membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan “*good neighbourhood policy*” melalui ASEAN (*Association South East Asian Nation*).

Karena keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi, gelar “Bapak Pembangunan Bangsa Indonesia” dan beberapa penghargaan internasional lainnya diberikan kepada Soeharto.

c. PERIODE BJ. HABIBIE

Selesainya masa Orde Baru membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memperbaiki komitmen yang salah dalam hal pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Presiden Habibie tetap mempertahankan dan mengandalkan dukungan dari negara barat terutama Amerika Serikat, dan dukungan finansial dari IMF daripada fokus dalam mengembangkan kedekatan hubungan dengan negara-negara Timur Tengah. Pada masa itu, Indonesia harus menghadapi serangan krisis finansial, transisi politik, dan pemulihan keamanan publik sehingga isu-isu domestik masih menjadi prioritas kebijakan rezim Habibie. Nuansa Islam dalam perumusan politik luar negeri Habibie hanya sebatas pada kepentingan untuk mempertahankan legitimasi rezimnya dan kepentingan politisnya.

Dilema yang terjadi pada politik luar negeri Indonesia di masa itu adalah bagaimana cara untuk bisa mengakomodasikan aspirasi Islam sebagai 1 (satu) kesatuan dan peran IMF serta kekuatan eksternal lainnya seperti Amerika Serikat dalam keberlangsungan

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
Indonesia. Pada akhirnya, politik luar negeri Indonesia era Habibie tetap melanjutkan politik luar negeri era Suharto.

Indonesia adalah negara di mana nasionalisme menjadi elemen penting dalam politik domestik. Oleh karena itu ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak asing akan mengundang respon publik yang besar. Misalnya, semakin maraknya demonstrasi anti-AS & IMF dengan tuduhan AS mengintervensi politik domestik Indonesia dengan menunda rencana bailout ekonomi untuk Ind sebesar US\$ 43 Milyar setelah terjadinya kerusuhan pada Mei 1998 dan jatuhnya Soeharto. Kemudian, Pemerintah Indonesia juga dituduh telah jatuh pada skenario “Perangkap Global Imperialism” dan telah menjual sebagian dari kedaulatannya dengan menerima bantuan IMF yang diikuti beberapa persyaratan tertentu.

Wacana untuk mencari bantuan finansial terhadap Indonesia yang sedang krisis banyak bermunculan seperti penolakan bantuan IMF karena harus menunggu, melainkan mencari bantuan dari negara-negara Arab yang kaya minyak. Meskipun banyak juga usulan yang mengakui peran IMF dalam membantu keuangan Indonesia. Meskipun IMF dirasa mempunyai motif tersendiri dalam membantu Indonesia karena pada saat

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
ini didukung oleh Kepala TNI dan Menteri Pertahanan Jendral Wiranto, yang mengatakan pada 28 Januari bahwa TNI menghargai keputusan untuk mengizinkan Timor-Timur memisahkan diri melalui cara terhormat.

Indonesia benar-benar membutuhkan IMF, IMF selalu menunda dengan alasan yang tidak jelas. Namun, jika IMF tidak memberikan kepercayaan kepada Indonesia maka institusi-institusi keuangan lainnya akan berat untuk membantu Indonesia pula. Pada pertengahan Juli 1998, IMF mengeluarkan dana bantuan sebesar US\$ 1 Milyar dan dengan jumlah yang sama pada bulan Agustus 1998.

d. PERIODE GUS DUR

Pemerintahan Habibie pada masa itu memberikan pelajaran penting bahwa politik luar negeri juga dapat memberikan dampak negatif bagi berlangsungnya transisi pemerintahan. Kebijakan Habibie dalam persoalan Timor-Timur membuktikan hal ini dengan jelas. Mekanisme perubahan paling penting di Timor-Timur pada 1999 menjadi perubahan kebijakan yang diumumkan setelah rapat kabinet akhir Januari. Pada 27 Januari Pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia harus bersiap untuk membantu kemerdekaan di Timor-Timur apabila rakyat Timor-Timur menolak tawaran rencana otonomi atau status spesial oleh Indonesia. Namun, tindakan tersebut tidak akan dilaksanakan sampai MPR merapatkannya setelah Pemilu 7 Juni. Pemerintah pada saat yang sama menawarkan perpindahan pemimpin pro-kemerdekaan Xanana Gusmao dari LP Cipinang (Jakarta) ke kompleks Pemerintahan di Jakarta. Perkembangan

Pada tahun 1999, Indonesia berhasil mengadakan Pemilu (Pemilihan Umum) yang mengantarkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Pada saat itu, Gus Dur menjadi figur yang dikonstruksikan dan dikenal publik sebagai tokoh “tengah” yang lebih baik dibandingkan dengan tokoh-tokoh reformis Indonesia lainnya. Tujuan Gus Dur jelas, Indonesia harus dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi pada sistem berpolitik dan bernegara yang selama ini dicengkeram rezim otoritarian Orde Baru, sekaligus harus dapat menunjukkan kepada dunia tentang wajah baru Indonesia yang lebih demokratis. Tanggung jawab besar berada di pundak pemerintahan Gus Dur.

Analisis diplomasi luar negeri tidak dapat dipisahkan dengan fenomena politik dalam negeri. Semakin kuat legitimasi dalam negeri suatu rezim politik maka semakin cair pula pencapaian dan akseptabilitas internasional dari suatu negara. Republik Indonesia yang saat itu dibawah kepemimpinan Gus Dur

menghadapi rintangan untuk merevitalisasi demokrasi demi mendapatkan kepercayaan masyarakat internasional.

Satu terobosan yang dilakukan Gus Dur yakni dia mengonsolidasi legitimasi politik domestiknya dari jauh (*remote consolidation*). Hal ini dilakukan secara spesifik dengan lontaran polemik kontroversial atas isu domestik, contohnya seperti isu tiga menteri yang terlibat KKN saat Gus Dur sedang berkunjung ke Amerika Serikat. Pada saat itu, Gus Dur tampak sedang mengukur dukungan internasional terhadap pemerintahannya dan hasilnya cukup baik dilihat dari masyarakat internasional yang sejauh itu mendukung secara politik pemerintahan Gus Dur yang telah mengukir wajah baru Indonesia. Figur Gus Dur menjadi figur yang paling cocok untuk membawa misi tersebut, terutama dalam kaitannya dengan rumusan politik luar negeri Indonesia melalui penyerapan aspirasi dan ekspektasi internasional.

Beberapa pola kebijakan politik luar negeri pada masa Gus Dur antara lain perumusan politik luar negeri berpola “arus-balik”. Biasanya, para Presiden Republik Indonesia terdahulu memastikan basis politik luar negerinya kemudian melakukan diplomasi ke luar (contohnya Soekarno yang mengibarkan bendera antinekolim yang konfrontatif, dan Soeharto yang menancarkan strategi

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
regionalisme ASEAN dan integrasi Timtim). Sedangkan, pola Presiden Gus Dur sebaliknya. Beliau menjangkau terlebih dahulu opini dunia atas konsep kebijakan melalui diplomasi. Setelah itu, barulah dirumuskan *platform* politik luar negerinya. Legitimasi, kapabilitas, dan talenta personal berdiplomasi menyokong pola baru ini. Contohnya Dalam periode pemerintahannya (22 bulan), Gus Dur telah melakukan kunjungan ke sekitar 29 negara dan bertemu banyak pemimpin serta tokoh dunia, mulai dari Bill Clinton, Jiang Zemin, Fidel Castro, Paus Yohannes Paulus II, Nelson Mandela, hingga Corazon Aquino, dan lain-lain.

Selain itu Gus Dur menyadari rendahnya daya tawar diplomasi Indonesia saat itu sehingga lebih mendahulukan diplomasi bilateral daripada multilateral. Namun pada beberapa kesempatan, Gus Dur menekankan tentang pentingnya kemandirian bangsa Indonesia, terutama terhadap rezim-rezim internasional yang ingin mengintervensi kebijakan dan arah politik Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika dia sempat menggagas Poros Jakarta-Beijing-India. Akan tetapi, pada kesempatan lain dia malah berujar, “Kalau kita tidak dapat bantuan (IMF), kita macet sebagai bangsa”.

e. PERIODE MEGAWATI

Pada masa pemerintahan Megawati yang terus menunjukkan kelemahan dari segi domestik. Pemerintahan koalisi ini menunjukkan rapuhnya politik Indonesia yang nampak dari kompetisi ideologi, terutama di antara nasionalisme yang sekuler dan Islam di dalam sistem politik yang bernuansa otoritarian yang masih tinggi.

Pemerintahan Megawati juga menunjukkan betapa sulitnya memperbaiki ekonomi di dalam situasi politik saat itu. Meskipun ada kestabilan politik di level elit, namun perbaikan keadaan politik masih jauh dari kata sempurna. Semua masalah dari pemerintahan Gus Dur sebelumnya tetap mempersulit pemerintahan Megawati. Perlu dilihat bahwa pada masa jatuhnya Gus Dur dan bangkitnya Megawati, jelas-jelas menunjukkan betapa kompleksnya keadaan politik Indonesia pada era setelah Soeharto. Setelah jatuhnya Soeharto pada Mei 1998, kekuatan antiorde baru – yang direpresentasikan oleh Gus Dur, Megawati dan Amien Rais – justru mereka menemukan diri mereka pada posisi yang sulit untuk membentuk sebuah gabungan kekuatan untuk menjalankan reformasi dan demokrasi.

Pada masa Megawati, ada 6 (enam) program kerja, yakni: mempertahankan kesatuan bangsa; melanjutkan reformasi

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
dan proses demokrasi; menormalisasikan kehidupan ekonomi; menjunjung tinggi hukum, menjaga keamanan dan perdamaian, menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme; mengembalikan kredibilitas internasional Indonesia; dan bersiap untuk Pemilu 2004. Meskipun 6 (enam) proker ini tidak menunjukkan arah politik, tetapi prioritas dari pemerintahan Megawati sudah terlihat, dalam hal ini politik luar negeri pun akan diarahkan sesuai dengan 6 (enam) proker tersebut dan juga agar bisa mendukung 6 (enam) proker tersebut.

Politik ‘Bebas Aktif’ dianut dalam masa pemerintahan Megawati. Baginya, lebih baik menggunakan tema tradisional yang sudah pernah ada dari pada mencari sebuah gaya baru dalam politik luar negeri. Dengan kata lain politik luar negeri Megawati menunjukkan sebuah lanjutan dari orde baru. Pertama, penekanan pada politik bebas aktif, yang menunjukan maksud untuk mengembalikan politik luar negeri Indonesia ke fungsi tradisionalnya dalam memenuhi politik dalam negeri dan keadaan ekonomi. Kedua, politik luar negeri Megawati digunakan sebagai alat untuk membentuk lingkungan atau hubungan internasional yang damai yang akan memfasilitasi keadaan dalam negeri. Ketiga, pemerintahan Megawati juga menandai kembalinya konsep politik luar negeri yang menganggap Asia

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
kunjungan ke luar negeri pertama kali yang dilakukan Presiden SBY adalah KTT APEC di Santiago, Chile.

Tenggara menjadi bagian penting untuk Indonesia dan juga bagi Asia Timur, Amerika Serikat dan negara-negara Pasifik selatan lainnya.

Menanggapi serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, Presiden Megawati berkunjung ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Bush pada tanggal 19 September, seminggu setelah peristiwa tersebut. Meskipun pada saat itu terjadi protes besar-besaran di Jakarta oleh banyaknya organisasi Islam dikarenakan tidak terimanya mereka atas tuduhan Amerika Serikat bahwa Osama bin Laden yang bertanggung jawab atas kejadian 11 September, bahkan hal ini juga oleh Wakil Presiden Hamzah Haz, dianggap sebagai tindakan Amerika Serikat untuk mendiskreditkan agama Islam.

f. PERIODE SBY

Orientasi politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperlihatkan upaya serius untuk tetap mempertahankan keterikatan Indonesia dengan pihak Amerika Serikat pada skala global maupun skala regional. Pada skala global, Indonesia tetap menjalin pusran sentripetal kekuasaan hegemonik Amerika Serikat dan Jepang. Pada skala regional, Indonesia tetap bertahan dengan 2 (dua) orientasi regionalisnya kepada ASEAN dan APEC. Memang karena kondisional,

Kedua macam orientasi politik luar negeri ini mampu membuat kredibilitasnya tinggi. Disebabkan bahwa pada masa pemerintah Presiden SBY merupakan produk yang demokratis karena ia dipilih berdasarkan pemilihan langsung. Kondisi ini mampu menciptakan kredibilitas Indonesia dalam hubungan internasional yang tidak perlu diragukan.

Komponen kedua adalah peran nasional. Peran nasional Indonesia dalam politik luar negeri berhubungan dengan tingkat turut andilnya Indonesia dalam berbagai hubungan internasional. keikutsertaan Indonesia dalam hubungan internasional mulai melemah setelah pada tahun 1998 sejalan dengan krisis ekonomi dan perubahan wujud menjadi krisis multi-dimensional, sehingga Indonesia lebih mudah disingkirkan dari percaturan politik tingkat regional maupun global. Peran politik luar negeri Indonesia pada masa itu condong pada pemulihan martabat bangsa dan negara sebagai 1 (satu) di antara negara penentu arah dan warna politik regional di Asia Tenggara. Hal ini dilakukan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan negara lain sekawasan.

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
Kehati-hatian dalam bertindak memang dibutuhkan namun dalam beberapa kasus juga membutuhkan kecepatan bertindak.

g. PERIODE JOKOWI

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, diharapkan dapat menciptakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan melihat kondisi terkini bangsa Indonesia. Ada 3 (tiga) permasalahan pokok yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Pertama, merosotnya kewibawaan negara yang terjadi ketika pemerintah tidak dapat memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara dan tidak mampu membaca ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), lemahnya penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam menanganu konflik sosial. Kewibawaan negara juga semakin dicerai saat negara mengikat sejumlah perjanjian internasional yang merusak karakter dan makna kedaulatan yang lebih memberi keuntungan untuk perseorangan, kelompok maupun perusahaan multinasional daripada untuk kepentingan nasional.

Kedua, kelemahan perekonomian bangsa. Lemahnya sendi perekonomian bangsa terlihat adanya kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi.

Komponen ketiga adalah tujuan. Tujuan politik luar negeri Indonesia menitikberatkan pada perjuangan pembenahan kondisi politik dan ekonomi di dalam negeri. Secara politik, Indonesia dihadapkan dengan persoalan separatisme yang digerakkan oleh individu yang tinggal di luar negeri. Pertama, pihak manapun di dunia internasional tidak mendukung separatisme di Indonesia, khususnya adalah GAM dan OPM. Tidak ada negara yang memiliki hubungandiplomatik dengan Indonesia dan tidak menyatakan mendukung GAM dan OPM. Kedua, sejumlah negara ternyata menjadi tempat perjuangan GAM di luar negeri seperti GAM Malaysia, GAM Australia dan mungkin di Timor Leste dan tempat lainnya. Secara ekonomi, Indonesia sangat membutuhkan bantuan luar negeri. Bahkan Indonesia semakin terjebak dalam bantuan luar negeri setelah bencana Tsunami melanda Aceh. CGI pun pada tahun 2005 pun masih memperlihatkan komitmennya untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia.

Komponen keempat adalah tindakan. Dari sisi tindakan, politik luar negeri Indonesia lebih mementingkan tindakan multilateral dan bilateral untuk menyuarkan jalan damai dalam menghadapi isu-isu politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia pada masa itu dirasa sangat berhati-hati.

Negara belum mampu memanfaatkan aneka kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mawujud (*tangible*) maupun bersifat non-fisik (*intangible*), bagi kesejahteraan rakyatnya.

Ketiga, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa, politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa yang toleran, memudahkan rasa solidaritas, dan sifat gotong royong. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang mempertajam kesenjangan nasional.

Atas dasar itu, Presiden Jokowi dalam pemerintahannya mengusung visi: “Perubahan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Dengan meneguhkan kembali jalan ideologi, karena ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan TriSakti (RJPMN 2014-2019). Di mana, penjabaran TriSakti yakni: Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Hal ini menjadi landasan pokok Presiden Jokowi di dalam merumuskan kebijakan politik luar negerinya.

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri, dengan menyelesaikan ketiga pokok permasalahan tersebut, maka muncul tantangan tersendiri untuk menyelesaikannya. Kebijakan politik luar negeri Indonesia berdasarkan tiga bidang yakni memperkuat kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

2) Upaya Peningkatan Kompetensi Militer Indonesia Untuk Pertahanan Negara

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.⁵

Aspek organisasi, peralatan utama sistem senjata dan pendukungnya, serta aspek pangkalan menjadi bagian dari kekuatan pertahanan militer. Sedangkan, untuk kemampuan pertahanan militer mencakup 5 (lima) kemampuan utama, yakni kemampuan intelijen, kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan pemberdayaan wilayah, dan kemampuan dukungan. Kekuatan

⁵ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, 2008, h. 43

pertahanan yang dibentuk secara profesional kemudian dikembangkan dalam suatu kekuatan pertahanan militer dengan maksud untuk mengimplementasikan strategi pertahanan negara yang nantinya digunakan untuk menghadapi ancaman nyata dan menangkal ancaman potensial.

Pertama, strategi pertahanan negara yang menjadi poin utama dalam penyusunan postur pertahanan militer yang berlaku saat ini lalu lebih ditekankan pada pertimbangan ancaman, sehingga secara substantif bersifat prosedural. Sedangkan, pertimbangan konstelasi geografis kurang mendapat porsi yang mencukupi dalam rumusannya. Kedua, postur pertahanan militer lebih menopang aspek statis yang mencakup konsep kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan. Pertimbangan faktor geografi dalam penyusunan postur pertahanan militer belum terefleksikan secara nyata. Hal ini dapat dilihat dari gelar kekuatan yang belum proporsional ditinjau dari aspek kematraan dihadapkan dengan kondisi geografi Indonesia. Ketiga, konsep Tri-Matra Terpadu dalam doktrin TNI (Tentara Nasional Indonesia) “Tri Dharma Eka Karma” lebih memberikan gambaran tentang penggabungan ketiga matra dalam satu komando tugas gabungan yang komposisinya disesuaikan dengan karakteristik ancaman dan jenis operasi yang akan dilaksanakan.

Sederhananya, arsitektur pertahanan militer dapat digambarkan sebagai perpaduan dinamis antara fungsi-fungsi peperangan yang ada dalam masing-masing matra yang dipadukan sehingga menghasilkan satu kekuatan pertahanan militer yang solid untuk menghadapi ancaman. Maksud dari fungsi peperangan yakni pengelompokan kegiatan serta sistem yang memiliki kesamaan, yang digunakan oleh seorang Panglima untuk melakukan segala upaya dalam rangka mencapai tujuan peperangan. Fungsi-fungsi tersebut mencakup:

a. Fungsi Sensor;

Fungsi sensor mencakup kegiatan pengumpulan informasi atau data, pengolahan informasi atau data menjadi intelijen, dan distribusi intelijen kepada unsur-unsur lain yang ada dalam mandala operasi. Dalam rangka mewujudkan Poros Maritim Dunia, maka fungsi sensor pertahanan militer merupakan perpaduan dari sistem sensor TNI AD, TNI AL, TNI AU dan sistem sensor sipil yang telah dimobilisasi menurut perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi sensor pertahanan militer disusun secara berjenjang mulai dari tingkat taktis, operasional, hingga tingkat strategis. Fungsi sensor yang handal antara perpaduan antara sensor teknis dan sensor manusia. Fungsi sensor dapat diselenggarakan dengan optimal jika

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
menjamin keterpaduan antar matra dalam pengoperasiannya. Untuk memperkuat sistem sensor, maka sistem penginderaan jarak jauh dengan menggunakan satelit nasional menjadi kebutuhan yang tidak boleh ditunda. Penggunaan satelit nasional ini akan memperluas capaian untuk mendapat informasi tentang kondisi geografis mandala operasi dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi.

didukung dengan sistem sensor yang handal, yang merupakan gabungan kemampuan sistem penginderaan jarak jauh yang didukung dengan teknologi informatika dan komputer serta sistem komunikasi yang aman dan terpercaya.

Agar dapat mewujudkan arsitektur pertahanan militer yang dapat menjawab tuntutan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka pembangunan kemampuan sistem sensor pertahanan militer harus menjadi prioritas karena sistem sensor merupakan mata dan telinga dari sistem pertahanan militer. Tanpa adanya sistem sensor yang baik, bangunan dari postur pertahanan militer tidak akan mampu mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman terhadap kedaulatan negara.

Sejauh ini, pengembangan dari kemampuan sensor pertahanan militer berorientasi pada peningkatan kemampuan sensor sistem pertahanan udara nasional. Perpaduan kemampuan sensor antar matra dilakukan pada tatanan operasional yang diatur dengan prosedur operasional oleh Komando Pertahanan Udara Nasional. Hal ini kurang menjawab kebutuhan informasi satuan-satuan matra lain dalam operasi gabungan yang bersifat Tri-Matra Terpadu. Kedepannya, pengembangan sistem sensor harus dilakukan secara terpadu dimulai dari perencanaan hingga tahapan penyelenggaraannya agar lebih

b. Fungsi Komando Dan Pengendalian;
Fungsi komando dan pengendalian diartikan sebagai kegiatan penggunaan kewenangan dan kekuasaan oleh seorang komandan secara tepat terhadap satuan bawahannya atau satuan-satuan lain yang berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan tugas. Dalam penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa komando dan pengendalian menjadi pusat dari seluruh kegiatan peperangan yang dilaksanakan oleh satuan-satuan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kampanye militer di dalam mandala perang. Fungsi ini sangat menentukan keberhasilan suatu peperangan. Dalam pelaksanaan fungsi ini dilakukan oleh Panglima atau Komandan yang didukung sistem komando dan kendali meliputi peralatan dan fasilitas, manajemen informasi, prosedur dan personil.

Keberadaan matra yang berbed dalam satu mandala peperangan

mengharuskan adanya pemaduan fungsi-fungsi komando dan pengendalian matra menjadi satu fungsi komando dan pengendalian gabungan yang terpadu. Pemaduan fungsi komando dan pengendalian antar matra merupakan inti dari interoperabilitas unsur-unsur yang diikutkan dalam pelaksanaan pertahanan militer.

Pembangunan sistem komando dan pengendalian harus dilakukan secara terpadu agar kesatuan komando dalam operasi militer gabungan dapat terwujud. Pembangunan sistem sensor tidak boleh dilupakan untuk dipadukan dengan pembangunan sistem komando dan pengendalian agar terjadi peningkatan kinerja sistem pengambilan keputusan yang berlaku dalam operasi militer gabungan.

c. Fungsi Pemukul;

Fungsi pemukul dilakukan melewati beberapa kegiatan penghancuran terhadap kekuatan lawan dengan mengandalkan peralatan utama sistem senjata (Alutsista). Alutsista menjadi salah satu elemen utama dari arsitektur pertahanan militer yang dapat menimbulkan efek penggentar atau *deterrence effect* untuk mencegah niat dari pihak lawan yang akan melakukan penyerangan terhadap negara lain. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan pada pengadaan Alutsista agar

d. Fungsi Mobilitas;

Fungsi mobilitas pada umumnya merupakan pelaksanaan kegiatan pemindahan pasukan dari satu daerah operasi ke daerah operasi lain di mandala perang untuk mendekatkan pasukan sendiri kepada musuh atau memusatkan kekuatan. Dalam arsitektur, fungsi mobilitas pertahanan militer mempunyai peran yang sangat penting jika dihadapkan dengan luas wilayah dan kondisi geografi Indonesia yang berupa kepulauan. Sistem transportasi militer yang mampu memindahkan pasukan secara tepat waktu dan tepat tujuan harus mendukung pelaksanaan fungsi ini.

e. Fungsi Proyeksi Kekuatan;

Fungsi proyeksi kekuatan merupakan kegiatan penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi suatu krisis, memberikan efek tangkal dan meningkatkan stabilitas kawasan. Definisi ini digunakan oleh banyak negara dengan pengertian yang berbeda-beda, sesuai dengankarakteristik geografi negaranya. Dalam pembahasan maritim secara spesifik, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengartikan proyeksi kekuatan sebagai penggunaan kekuatan di lingkungan maritim, termasuk penggunaan kekuatan operasi militer ofensif untuk penghancuran kekuatan militer lawan atau

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
harus tersusun dalam penyusunan postur pertahanan militer yang tepat. Arsitektur pertahanan militer di antaranya kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan. Penyusun arsitektur pertahanan militer harus memperhatikan dan mempertimbangkan hasil analisa yang diperoleh dari lingkungan strategis yang berkaitan dengan dinamika kondisi geografi nasional.

pengecanaan militer pihak lawan yang ingin mendekati pasukan sendiri. Proyeksi kekuatan maritim biasanya dilakukan dengan operasi pengendalian laut yakni penggunaan kekuatan laut yang didukung dengan kekuatan udara juga darat secara tepat dengan tujuan untuk mencapai tujuan militer di wilayah laut yang vital. Operasi ini dilaksanakan dengan cara penghancuran kekuatan laut pihak lawan, mengganggu jalur perdagangan laut pihak lawan, mengamankan jalur laut yang vital, serta mewujudkan keunggulan laut di daerah operasi.

f. Fungsi Dukungan.

Fungsi dukungan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan keunggulan apabila dikelola dengan benar. Dalam kaitan pembangunan kekuatan pertahanan militer guna mewujudkan Poros Maritim Dunia, fungsi dukungan harus dikembangkan secara tepat agar mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertahanan militer dalam rangka mendukung Poros Maritim Dunia.⁶

Tidak hanya berbicara mengenai arsitektur pertahanan militer dalam postur pertahanan negara namun pengembangan arsitektur pertahanan militer harus kita perhatikan. Arsitektur pertahanan militer

Kegiatan yang dirasa sangat penting dalam penyusunan ini adalah melakukan *wargaming* di mana ini dimaksudkan untuk menganalisa keterlibatan kekuatan TNI dalam suatu operasi militer dalam rangka menghadapi ancaman kedaulatan negara. Jika *wargaming* ini benar, maka didapatkanlah gambaran apakah sudah mampu menjawab tantangan tugas untuk menghadapi ancaman yang dihadapkan dengan kondisi lingkungan geografis negara kepulauan atau tidak.

C. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Di dalam pembahasan politik luar negeri Indonesia telah menentukan posisinya sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, di mana dalam hal kebijakan luar negeri Indonesia tidak akan terpengaruh oleh tangan-tangan negara lain. Di sini Diplomasi berperan sebagai *Soft Power* yang tentunya tidak

⁶ Kementerian Pertahanan, *Pengembangan Postur Pertahanan Militer Guna Mendukung Terwujudnya Poros Maritim Dunia*, Media Informasi Kementerian Pertahanan, Volume 59, 2016, h. 16

akan bisa terlepas dari kekuatan kekuasaan, pemerintahan. Kekuatan dari diplomasi inilah yang menjadikan sebuah negara menjadi lebih tangguh dan kuat dalam mempertahankan ideologi dan ketahanan nasionalnya.

- b. Arsitektur pertahanan militer tidak hanya berperan dalam menguatkan postur pertahanan militer untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, tetapi yang lebih krusial lagi adalah untuk meningkatkan daya gentar (*deterrence effect*) postur pertahanan militer terhadap pihak luar yang akan mengganggu kedaulatan negara. Dihadapkan dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan, arsitektur pertahanan militer harus disiapkan secara dini sebagai salah satu prasyarat bagi keberhasilan sistem pertahanan negara.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Asep Setiawan, 2016, *Teori dan Praktik Diplomasi*, Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Pengantar Soal Perkembangan Politik Luar Negeri Terutama Kerjasama Negara-Negara ASEAN*
- Kementerian Luar Negeri, 2020, *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024*

Peraturan

- Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Diplomatik

Jurnal

- Agus Subagyo & Yusep Ginanjar, *Sinergi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Indonesian Perspective*, Volume 5, Nomor 1, 2020
- Heru Susetyo, *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 6, Nomor 1, 2008
- Media Informasi Kementerian Pertahanan, *Pengembangan Postur Pertahanan Militer Guna Mendukung Terwujudnya Poros Maritim Dunia*, Puskom Publik Kemhan, Volume 59, Nomor 43, Maret-April 2016
- Widya Noventari, *Peran Diplomasi Politik Luar Negeri dan Angkatan Perang dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Nomor 2, 2014